

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktek di Era Globalisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Azhar, Muhammad, 2003, *Pendidikan Antikorupsi, Partnership Koalisi Antar Umat Beragama untuk Antikorupsi*, LP3 UMY, Yogyakarta.
- BrotoSusilo, Agus, 1986, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2018, *Edisi Revisi Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Malang.
- Danil, Elwi, 2012, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hatrik, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kristian, 2018, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, B. Arief, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ruang Lingkup Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 133.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH Bandung.
- Muladi dan Diah Sulistiyani, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung.
- Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pohan, Agustinus, 2018, *Panduan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, KPK RI, Jakarta.
- Pramono, Widyo, 2017, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Kompas Media Utama, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Samudera, Teguh, Dkk., 2008. *Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Sjawie, Hasbullah F, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sjahdeni, Sutan Remi, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Syahrani, Ridwan 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakri, Bandung.

- Syamsuddin, Azis, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Dasar-Dasar Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1995, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soge, Paulinus, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pemidanaan Korporasi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tim Pokja Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 2017, *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yudoprakoso, Paul W, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi*, PT. Kanisius, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan.**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi tahun 2003 yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Againsts Corruption, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

*United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention Against Corruption.*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: B-036/A/Ft.1/06/2009 perihal Korporasi Sebagai Tersangka/Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2058).

### C. Jurnal

Marbun, Andreas Nathaniel, “Kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Anti Korupsi”, *Prisma Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, Volume 37, 2018.

Panggabean, Mompang L “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana”, *dictum jurnal kajian putusan pengadilan*, Edisi 12-Maret 2017.

Pratama, Alfian Wahyu, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Korporasi (Studi Pembaruan Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Korporasi)”, *Jurnal*

*NESTOR Magister Hukum Universitas Tanjungpura*, Volume 2, Nomor 2, 2012.

Susanti, Dwi Siska, 2018, “Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan”, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS KPK*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018.

#### **D. Karya Ilmiah**

Damaryanti, Henny, 2002, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Kajian Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Efriza, 2012, “Analisis Dasar Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Rofiana, Reine, 2014, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pidana Pengganti Denda”, *Tesis*, Program Studi Litigasi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yahya, Bettina, 2017, “Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

#### **E. Artikel**

Muladi, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Harian Kompas*, Sabtu-27 Juli 2013, Rubrik Opini, hlm. 6.

#### **F. Makalah**

Muhammad Hatta Ali, 2014, *Titik Singgung Wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*, Makalah *keynote speaker* dalam seminar tentang Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2014 di Merlyn Park Jakarta.

#### **G. Internet**

Hukum Online, “Lika-Liku Menarik Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Korupsi”,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5885f5667b8a1/likaliku->

*menarik-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-kasus-korupsi*, diakses tanggal 26 Agustus 2019.

Hukumonline, “Ini Korporasi Pertama yang Dijerat UU Tipikor” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/ini-korporasipertama-yang-dijerat-uu-tipikor>, diakses tanggal 26 Agustus 2019.

Indonesia Corruption Watch, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi” <https://antikorupsi.org/id/news/pertanggungjawaban-pidana-korporasi>, diakses tanggal 29 September 2019.

Kejaksaan.go.id, “Tentang Kejaksaan”, [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3), diakses pada tanggal 16 September 2019.

Nusa Konstruksi Enjiniring, “Strategy, Vision, & Mission”, [http://nusakonstruksi.com/publik/about\\_us/Strategy](http://nusakonstruksi.com/publik/about_us/Strategy), diakses tanggal 26 Agustus 2019.

Reda Manthovani, “Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Kejahatan Di Sektor Kehutanan: Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Sektor Kehutanan Di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Korporasi”, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/PENUNTUTAN%20KORPORASI%20SEBAGAI%20PELAKU%20TINDAK%20PIDANA%20DALAM%20KEJAHATAN%20DI%20SEKTOR%20KEHUTANAN.pdf>, diakses tanggal 19 September 2019.

## **H. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN. Bjm tanggal 09 Juni 2011 dengan Terdakwa PT Giri Jaladhi Wana, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 04/Pid.Sus/2011/PT. Bjm tanggal 10 Agustus 2011.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg dengan Terdakwa PT Cakrawala Nusadimensi.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 27 November 2017 dengan Terdakwa Dudung Purwadi.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Dki tanggal 12 Februari 2018 dengan Terdakwa Dudung Purwadi.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Jkt.Pst tanggal 03 Januari 2019 dengan  
Terdakwa PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk.